

## 12 Prioritas Agenda Strategis Dalam Perspektif Kebijakan Publik

Made Pasda Gunawan <sup>(1)</sup>  
Nyoman Sri Subawa <sup>(2)</sup>

*Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Pendidikan Nasional <sup>(1)</sup>*

*Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Pendidikan Nasional <sup>(2)</sup>*

*pasdagunawanmade@gmail.com <sup>(1)</sup>*  
*srisubawa@undiknas.ac.id <sup>(2)</sup>*

### ABSTRACT

*After the entry into force of the Law (UU) No. 23 Year 2014 on Regional Government in lieu of Law. No. 32 of 2004, a trip of regional autonomy entered a new phase with a change in the policy of regional autonomy that is pretty basic. The consequences of regional autonomy with the principle of decentralization, encouraging regions to improvisation, creativity, innovation to policy distortions.*

*Public policy related to the Local Government under the leadership of Buleleng Regent Putu Agus Suradnyana, ST and Vice Regent dr. I Nyoman Sutjidra, Sp. OG as Regent and Vice Regent of Buleleng period 2012-2017 seeks to implement public policies contained in the Medium Term Development Plan (RPJMD) in the form of a vision Buleleng years 2012-2017, namely: A society Buleleng an independent, prosperous, and sustainable peace based on Tri Hita Karana.*

*As for answering the vision of Buleleng, Buleleng regency sparked the development program in the form of 12 Strategic Priorities Agenda (PAS) development phases Buleleng 2012-2017 period, including: Structuring Bureaucracy, alleviation of poverty, improvement of accessibility and quality of education, improving the accessibility and quality of health, improving the quality of labor and workforce expansion, economic development, infrastructure development, improvement of the investment climate, law enforcement, development and cultural preservation, improvement of the quality of disaster management and improving the quality of environmental conservation. Of the 12 PAS program is then implemented and translated into 26 obligatory functions and 8 affairs program options through regional work units (SKPD).*

**Keyword : Public Policy; Vision Development; 12 Strategic Priorities Agenda (PAS)**

### PENDAHULUAN

Setelah berlakunya Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU. No. 32 Tahun 2004, perjalanan otonomi daerah memasuki babak baru dengan adanya perubahan kebijakan

penyelenggaraan otonomi daerah yang cukup mendasar. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk menyempurnakan berbagai pengaturan dalam UU sebelumnya yang banyak menimbulkan permasalahan karena ketidak jelasan atau mengandung multitafsir dalam

penerapannya apalagi ditambah adanya perubahan praktek hubungan pemerintah pusat dan daerah yang sebelumnya sentralisasi, berubah menjadi desentralisasi dimana otonomi daerah dititik beratkan pada daerah kabupaten/kota.

Konsekuensi otonomi daerah dengan prinsip desentralisasi ini, mendorong daerah untuk melakukan improvisasi, kreasi, inovasi hingga distorsi kebijakan, seperti yang disampaikan Ateng Syafruddin dalam Juanda (2008:126) bahwa dalam pemberian tanggungjawab terkadang dua unsur yakni pemberian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan serta kewenangan untuk melaksanakannya dan pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri bagaimana tugas-tugas itu. Adanya kebebasan untuk berinisiatif merupakan suatu dasar pemberian otonomi daerah, karena dasar pemberian otonomi daerah adalah dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan setempat.

Secara garis besar arah kebijakan publik pemerintah Kabupaten Buleleng telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017, dalam RPJMD memuat dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil

Bupati terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Tahun 2012. Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, maka visi, misi dan program tersebut dijabarkan melalui strategi pembangunan daerah berupa kebijakan dan program pembangunan, beserta kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah pelaksanaannya.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, RPJMD Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2023, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.

Sedangkan untuk menjawab visi Kabupaten Buleleng, Pemkab Buleleng mencetuskan program pembangunan berupa 12 Prioritas Agenda Strategis (PAS) dalam tahapan pembangunan Kabupaten Buleleng periode 2012-2017,

diantaranya : Penataan Birokrasi, Penanggulangan kemiskinan, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, peningkatan aksesibilitas dan kualitas kesehatan, peningkatan kualitas tenaga kerja dan perluasan tenaga kerja, pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur, perbaikan iklim investasi, penegakan hukum, pengembangan dan pelestarian kebudayaan, peningkatan kualitas penanganan bencana dan peningkatan kualitas pelestarian lingkungan. Dari program 12 PAS kemudian diimplementasikan dan dijabarkan kedalam 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan melalui program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian terkait strategi pembangunan 12 Prioritas Agenda Strategis (PAS) yang dicanangkan Pemkab Buleleng periode pemerintahan Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, ST dan Wakil Bupati Buleleng dr. I Nyoman Sutjidra, Sp. OG periode tahun 2012-2017 dalam perspektif kebijakan publik, serta untuk mengetahui sejauh mana efektivitas 12 PAS dalam mewujudkan Buleleng yang Sejahtera, Mandiri, ter-Integrasi, Lestari dan ber-Etika (SMILE).

## **KAJIAN TEORITIS**

Dalam konteks pelaksanaan pembangunan daerah, sesuai dengan peran pemerintah daerah dalam era otonomi luas, perencanaan pembangunan daerah diperlukan karena pelaksanaan pembangunan didesentralisasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sebelum menjelaskan tentang perencanaan pembangunan daerah, perlu dipahami terlebih dahulu perencanaan pembangunan. Menurut Bratakusumah (2003) dalam Iwan Kustiwan (2008 : 53) menyatakan bahwa unsur-unsur dalam perencanaan harus disusun berdasarkan kondisi yang didukung oleh data dan fakta yang ada serta tujuan (visi) yang hendak dicapai (goals - vision).

Menurut Sjafrizal (2009 : 15), secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan. Karena itu perencanaan pembangunan hendaklah bersifat implementif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan).

Dalam hubungannya dengan suatu daerah sebagai area (wilayah) pembangunan dimana terbentuk konsep perencanaan pembangunan daerah (Riyadi dan Deddy Supriadi Bratakusumah, 2004 : 7) dapat dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan yang dimaksudkan untuk

melakukan perubahan menuju arah yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi tetap berpegang pada azas prioritas.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah sebagian disebabkan oleh kegagalan birokrasi dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan publik. Kegagalan tersebut adalah information failures, complex side effects, motivation failures, rentseeking, second best theory, implementation failures (Hakim, 2003).

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah pada Pemerintah Kabupaten Buleleng, pada beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Badan, Dinas dan Bagian lingkup Pemkab Buleleng, melihat Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dalam menyusun dan mensukseskan strategi pembangunan 12 Prioritas Agenda Strategis (PAS), selain itu juga untuk mengetahui bagaimana implementasi dan evaluasi di masing-masing SKPD Lingkup Pemkab Buleleng.

Penelitian ini juga akan mengambil lokasi di wilayah Kabupaten Buleleng pada 9 Kecamatan, yaitu Kubutambahan, Tejakula, Sawan, Buleleng, Sukasada, Banjar, Seririt Busungbiu, dan Gerokgak. Alasan pemilihan lokasi ini adalah untuk mengetahui penilaian kelompok masyarakat, lembaga social masyarakat (LSM), jurnalis dan masyarakat Buleleng di 9 kecamatan pada Kabupaten Buleleng dianggap representative mencerminkan Kabupaten Buleleng secara keseluruhan.

### **Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan menggunakan metode observasi dan wawancara. Metode observasi yang dimaksudkan adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan secara langsung pada obyek penelitian yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Sedangkan yang dimaksud dengan wawancara adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak-pihak yang terkait langsung dengan kegiatan program 12 Prioritas Agenda Strategis yang dilaksanakan oleh SKPD lingkup Pemkab Buleleng. Untuk data sekunder diperoleh melalui penelusuran dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan program 12 PAS.

### **Gambaran Umum**

Berdasarkan kondisi umum Kabupaten Buleleng saat ini, permasalahan, tantangan dan isu-isu strategis yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis, potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM), maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2012-2017 dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Buleleng adalah **"Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri, Sejahtera, Damai Dan Lestari Berlandaskan Tri Hita Karana"**

Sedangkan Misi pembangunan Kabupaten Buleleng memuat gambaran umum akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Buleleng lima tahun ke depan (2012-2017), maka Pemerintah Kabupaten Buleleng mencanangkan 12 Agenda Prioritas Pembangunan yang dikenal dengan 12 Prioritas Agenda Strategis (12 PAS).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sesuai dengan hasil penelitian tentang implementasi program 12 Prioritas Agenda Strategis (PAS) di Kabupaten

Buleleng, dapat diketahui dari program kerja SKPD lingkup Pemkab Buleleng. Secara konseptual proses Pembangunan di Kabupaten Buleleng telah mencerminkan otonomi daerah dengan prinsip desentralisasi sesuai dengan undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan bahwa pemerintah daerah agar senantiasa berinovasi dan berkreasi untuk mempercepat kesejahteraan masyarakatnya.

Untuk itu, sebagaimana dijelaskan Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, ST dalam wawancaranya menyatakan bahwa semangat otonomi daerah yang mengharuskan Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk lebih bernovasi dalam menyusun program pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng tahun 2012-2017 serta Visi Pembangunan Kabupaten Buleleng yakni terwujudnya masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera, damai dan lestari berlandaskan Tri Hita Karana. Jadi, kehadiran strategi 12 Prioritas Agenda Strategis (PAS) merupakan solusi yang dianggap efektif dalam menjawab permasalahan di Kabupaten Buleleng.

### **Penataan Birokrasi**

Penataan Birokrasi dan Kemandirian Aparatur Pemerintah menjadi

prioritas utama Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam rangka peningkatan profesionalisme Aparatur Pemerintah serta mewujudkan *Good governance* dalam mengelola potensi serta penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat.

Selanjutnya, jika dilihat dari syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut Teori Implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun yang dikutip Solichin Abdul Wahab (1997:71-78) pelaksanaan penataan birokrasi di Kabupaten Buleleng telah didukung oleh pelaksanaan program dan sumber daya yang cukup memadai untuk bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Bahkan dalam implementasinya, penataan birokrasi dan kemandirian aparatur pemerintah di Kabupaten Buleleng telah mendapatkan pengakuan berupa penghargaan tingkat nasional yang diperoleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) berupa penghargaan sebagai kabupaten terbaik dalam penerapan Implementasi Assesment Center khususnya dalam lelang jabatan eselon II yang telah dilakukan Pemkab Buleleng ketika memilih Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

### **Pengentasan Kemiskinan**

Dinamis dan kompleksnya permasalahan kemiskinan sehingga dalam penanganannya memerlukan integrasi berbagai program kegiatan dan lintas sektoral. Penanggulangan kemiskinan merupakan agenda prioritas yang harus ditangani secara berkesinambungan dan sistemik melalui berbagai urusan dengan program dan kegiatan yang mampu mengentaskan kondisi miskinnya atau sifatnya pengamanan terhadap penderitaan keluarga miskin agar jangan terjerumus kedalam kondisi yang lebih terpuruk.

Dilihat dari syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut Teori Implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun yang dikutip Solichin Abdul Wahab (1997:71-78) bahwa upaya penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Buleleng yang diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang baik antara Pemerintah dengan masyarakat, dilihat dari upaya Pemkab Buleleng untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama berupa beberapa program bantuan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Upaya-upaya positif telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Buleleng, tidak hanya melalui program inovatif tetapi juga menggandeng pihak swasta dan masyarakat untuk bisa

bersama-sama menanggulangi permasalahan kemiskinan di Kabupaten Buleleng, salah satu upaya yang dilakukan adalah pemberian bantuan bedah rumah yang dilakukan Pemkab Buleleng serta penyerahan sembako yang digelar rutin kepada keluarga miskin.

### **Peningkatan Kualitas Pendidikan**

Pembangunan urusan pendidikan merupakan salah satu indikator penting dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karenanya, Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan menjadi agenda prioritas karena permasalahan yang dihadapi adalah belum meratanya masyarakat usia belajar dapat mengakses kesempatan belajar pada pendidikan formal maupun non formal, sehingga Angka Partisipasi Sekolah (APS) belum mencapai seratus persen, demikian juga kualitas SDM-nya masih perlu peningkatan yang setiap tahunnya ditingkatkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Upaya yang dilakukan Pemkab Buleleng, jika dilihat dari syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut Teori Implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun yang dikutip Solichin Abdul Wahab (1997:71-78) bahwa Pemkab Buleleng melalui Dinas

Pendidikan telah melakukan kebijakan di dunia pendidikan sesuai dengan kebutuhan pendidikan di Kabupaten Buleleng, tidak hanya lewat program inovasi tetapi juga telah menyusun perencanaan program jangka panjang.

### **Peningkatan Kualitas Kesehatan**

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu indikator penting dalam penentuan dan peningkatan IPM. Kualitas kesehatan masyarakat yang indikasinya tercermin melalui peningkatan umur harapan hidup merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan seluruh pembangunan yang dilaksanakan secara terintegrasi dan lintas urusan.

Pembangunan kesehatan dilakukan melalui pencegahan, pemeliharaan kesehatan dan rehabilitasi kesehatan. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai dan harga hidup sehat, maka pemerintah harus mampu menyediakan kebutuhan sarana prasarana kesehatan dan tenaga medis yang berkualitas dengan pelayanan prima. Untuk itu pembangunan kesehatan masih perlu ditingkatkan dan menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Buleleng.

### **Peningkatan kualitas Tenaga Kerja**

Dilihat dari program, secara bertahap Pemkab Buleleng melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menggelar

pelatihan khusus bagi masyarakat Buleleng yang ingin meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja, hal ini penting mengingat keterampilan khusus diperlukan untuk memenuhi standar dalam mencari ataupun membuka lapangan kerja. Adapun program yang saat ini sedang berjalan yakni kerjasama antara Pemkab Buleleng dengan koperasi peternakan Tsubaka Jepang dan perusahaan perkebunan buah kiwi di New Zealand, dua Negara ini secara khusus meminta Pemkab Buleleng untuk menyediakan tenaga kerja terlatih yang akan dipekerjakan di Jepang dan di New Zealand dengan status tenaga kerja magang selama 3 tahun.

Dari data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) adapun dasar kerjasama merujuk pada adanya kesepakatan berupa Memorandum of Understanding (MOU) antara Direktorat Jenderal Binalattas Kemnakertrans R.I dengan The Association for International Manpower Development of Medium and Small Enterprises Japan (IMM) Tanggal 16 September 1994 diperbaharui dengan amandemen pada tanggal 6 September.

### **Pembangunan Ekonomi**

Dilihat dari Implementasi peningkatan ekonomi, upaya Pemkab Buleleng dalam pemberdayaan serta

memberikan stimulus semangat *enterpereneurship* kepada masyarakat telah membuahkan hasil, salah satu upaya yang berjalan sukses adalah peningkatan kualitas UMKM di Kabupaten Buleleng khususnya para pengerajin endek yang telah memiliki wadah dan kesempatan yang baik untuk mempromosikan produknya. Hal ini pun dinilai sangat sesuai dengan semangat pemberdayaan masyarakat dimana Dinas Koperasi dan Perdagangan dan Perindustrian (Diskopdagprin) sebagai leading sektor telah mampu mewadahi kebutuhan para pengerajin endek di Buleleng, saat ini kain endek khas Buleleng dimunculkan sebagai *trade mark* salah satu warisan Buleleng.

### **Pembangunan Infrastruktur**

Keberhasilan pembangunan pendidikan, kesehatan maupun ekonomi membutuhkan dukungan infrastruktur yang baik dan mantap. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur menjadi agenda prioritas dalam rangka menyiapkan sarana dan prasarana pendukung yang memadai guna mengakselerasi pembangunan daerah dalam segala aspek dimaksud.

Dari sisi implementasi 12 Prioritas Agenda Strategis (PAS), pembagunan Infrastruktur menjadi program yang paling menonjol terlihat mendapatkan prioritas, dari beberapa



narasumber yang peneliti wawancara hampir seluruhnya sepakat bahwa perbaikan infrastruktur Kabupaten Buleleng saat ini sudah berjalan sangat baik, indikatornya banyaknya perbaikan akses jalan maupun infrastruktur fasilitas umum yang terus dikebut oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng.

### **Perbaikan Iklim Investasi**

Pemkab Buleleng sangat menyadari pentingnya investasi yang masuk di Buleleng untuk dapat menghidupkan roda perekonomian masyarakat, hal ini melihat pada penghasilan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai masih relatif masih kecil di dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Bali. Upaya yang perlahan dijalankan adalah meningkatkan peran Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Buleleng untuk bisa memberikan pelayanan secara cepat dan tepat, terutama dalam mengurus izin usaha berkoordinasi dengan Bagian Ekonomi Pembangunan untuk kemudian membuka ruang investasi yang sebesar-besarnya dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku.

### **Penegakan Hukum, Ketentraman dan Ketertiban.**

Agenda Penegakan Hukum, Ketentraman dan Ketertiban menjadi

prioritas pembangunan dalam upaya menciptakan dan menjamin adanya kepastian hukum/supremasi hukum serta menghargai hak azasi manusia. Penegakan hukum sendiri menjadi penting untuk bisa diimplementasikan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai cerminan dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Buleleng.

Secara umum penegakan hukum tidak hanya berlaku internal pemerintahan semata namun juga membangun sinergitas antara Pemerintah dengan lembaga-lembaga yudikatif seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, pemerintah Kabupaten Buleleng sendiri saat ini sudah membangun upaya komunikasi tersebut dapat dilihat dari upaya Pemkab Buleleng dalam pencegahan kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam tatanan birokrasi Pemerintahan dengan menggandeng Kejaksaan dalam membuat Memorandum of understanding (MoU) terhadap pertimbangan dan kajian hukum dalam setiap kebijakan pengelolaan keuangan Pemkab Buleleng.

### **Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan**

Agenda Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah menjadi prioritas sejalan dengan Bali sebagai daerah tujuan wisata budaya. Dengan adanya agenda prioritas ini, maka akan

digali, diidentifikasi dan dikembangkan potensi budaya daerah, serta dilestarikannya kebudayaan dan kesenian khas Kabupaten Buleleng.

Pemkab Buleleng memiliki cara khusus untuk mempromosikan pariwisata sekaligus upaya pelestarian kebudayaan, caranya beberapa event bertajuk festival pun digelar guna memeriahkan peringatan hari-hari besar nasional serta menyesuaikan musim berlibur wisatawan, saat ini Pemkab beberapa event pun telah masuk *calender of event* yang diselenggarakan Pemkab Buleleng setiap tahunnya

### **Peningkatan Kualitas Penanganan Bencana**

Agenda Peningkatan Kualitas Penanganan Bencana menjadi prioritas sehubungan dengan wilayah Kabupaten Buleleng yang rentan/rawan bencana. Dengan meningkatnya kualitas penanganan bencana diharapkan segala kemungkinan bencana yang akan terjadi dapat diantisipasi dan dimitigasi.

Dilihat dari historis dan geografis Buleleng yang rawan terhadap bencana tanah longsor dan banjir, Pemkab Buleleng secara resmi membantuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buleleng pada tahun 2012 untuk bisa mengakomodir penanggulangan

bencana secara terintegrasi di Kabupaten Buleleng.

### **Peningkatan Kualitas dan Kelestarian Lingkungan**

Komitmen Pemkab Buleleng dalam upaya peningkatan kualitas dan kelestarian lingkungan di Kabupaten Buleleng sangat tinggi, hal tersebut didukung oleh pernyataan beberapa narasumber yang menyampaikan bahwasannya beberapa program Pemkab Buleleng dalam penataan lingkungan sudah berjalan sangat baik bahkan telah mampu meraih prestasi Internasional menerima Penghargaan "*Coral Conservation Prize*" yang merupakan Penghargaan International karena keberhasilan Kabupaten Buleleng dalam membangun Kawasan Konservasi Perairan Buleleng, khususnya dalam hal pelestarian terumbu karang di Desa Bondalem

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan pokok permasalahan yang diangkat, maka peneliti mengambil kesimpulan :

1. Secara umum implementasi dari program 12 Prioritas Agenda Strategis (PAS) pada Pemerintah Kabupaten

- Buleleng sudah terlaksana sesuai dengan perencanaan yang dijabarkan dalam 28 urusan wajib dan 8 urusan pilihan melalui program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), namun permasalahan yang masih menjadi hambatan adalah tidak meratanya kemampuan SKPD dalam menterjemahkan program serta jangka waktu pelaksanaan kegiatan yang relatif pendek sehingga terjadi kesenjangan antar program kegiatan yang tertuang program 12 PAS.
2. Beberapa faktor-faktor yang dominan mempengaruhi 12 PAS adalah Komunikasi, Sumber daya manusia, kecenderungan atau tingkah dan struktur birokrasi. Dari faktor tersebut Faktor Politik yang bersumber dari kecenerungan dan tingkah dinilai paling besar pengaruhnya dalam menentukan arah kebijakan yang tertuang dalam 12 PAS utamanya menjelang perhelatan ajang politik, beberapa program yang tertuang dalam 12 PAS dinilai menonjol dilakukan terutama kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan yang menyentuh langsung masyarakat.
  3. Beberapa strategi dilakukan Pemkab Buleleng dimulai dari perencanaan yang baik, perencanaan yang

melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk terlibat langsung dalam penyusunan RPJMD sehingga apa yang tertuang dalam dokumen program 12 PAS benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Buleleng. Selanjutnya proses implementasi kegiatan yang baik juga menjadi kunci kepuasan masyarakat Buleleng terhadap kinerja Pembangunan.

4. Tingkat efektivitas dari 12 Prioritas Agenda Strategis (PAS) dalam upaya menuju Buleleng Sejahtera, Mandiri, ter-Integrasi, Lestari, ber-Etika (SMILE) dinilai sudah menuju target, namun demikian banyak kendala yang dihadapi terutama terkait dengan jangka waktu yang dinilai masih terlalu pendek yakni 5 tahun, program ini pun diharapkan secara paripurna dapat dilanjutkan tidak hanya oleh Bupati dan Wakil Bupati saat ini tapi oleh pengganti berikutnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S.Z. (2004). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Agustino, L. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.

- Anderson, J. (1979). *Public Policy Making*, (second ed). New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Danim, S. (2000). *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Danim, S. (2004). *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Bengkulu: PT RINEKA CIPTA.
- Dunn, W. N. (2000). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjahmada, University Press.
- Dunn, W. N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik : Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Effendy, O. U. (2002). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Gaffar, A. (2009). *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gedeian, A. G. (1991). *Organization Theory and Design*. University of Colorado at Denver.
- Juanda. (2008). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: PT Alumni.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Personalialia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Moleong, J.L. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakaya.
- Mustopadidjaya, AR. (2002). *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta : LAN.
- Muchsin dan Fadillah. P. (2002). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Malang: Averroes Press
- Nasution, A. H. (2003). *Perencanaan dan Pengendalian Produksi*, Edisi 1. Surabaya: Guna Widya.
- Nugroho, R. D. (2004). *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Nugroho, Iwan dan Rokhmin Dahuri. (2004). *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.
- Pontoh, K. N., Iwan Kustiawan. (2008). *Pengantar Perencanaan Perkotaan*. Bandung : ITB
- Riyadi dan Bratakusumah, D. (2004). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Sjafrizal. (2009). *Teknik Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah*. Jakarta: Baduose Media.
- Sunggono, B. (1994). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Solichin, A.W. (1997). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Malang
- Steers, M. R. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Subarsono, AG. (2005). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- T. Tikson, D. (2005). *Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita.